

PERAN GURU DALAM MENDESAIN PENGAJARAN INKLUSIF MELALUI PENDEKATAN
DIFERENSIASI DI SEKOLAH DASARAksay Marta Dinata¹, Dea Puspita Wandu², Dwi Helmaisyah Risty³,
Tiara Anisa⁴, Dea Mustika, S.Pd., M.Pd⁵

Universitas Islam Riau

Jl. Kaharuddin Nasution 113, Pekanbaru, Riau, 28284

Email : aksaymartadinata7@gmail.com¹, Pdea0605@gmail.com²,
dwihelmaisyahristy@gmail.com³, kktiaraanisa2005@gmail.com⁴, deamustika@edu.uir.ac.id⁵**Abstract**

Inclusive education is a crucial effort to realize justice and equity within the national education system, especially at the elementary school level. However, the implementation of inclusive education still faces various challenges, particularly regarding teachers' readiness and competencies in managing heterogeneous classrooms. This study aims to explore the role of teachers in designing inclusive teaching through a differentiated instruction approach in elementary schools. The method used is a descriptive qualitative literature study by reviewing various written sources related to the theory and practice of inclusive education and differentiation. The findings indicate that the differentiated instruction approach enables teachers to adjust the content, process, and product of learning according to individual student needs, thereby creating an inclusive, equitable, and meaningful learning environment. The success of implementation heavily depends on teachers' pedagogical competence, collaboration with stakeholders, and adequate policy and institutional support. Despite challenges such as limited training and resources, strengthening regulations and continuous professional development can enhance the effectiveness of differentiated inclusive education. Thus, teachers play a vital role as change agents in creating inclusive and just education.

Keywords: *Inclusive Education, Differentiated Instruction, Teachers, Elementary School, Pedagogical Competence*

Abstrak

Pendidikan inklusif merupakan upaya penting dalam mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional, khususnya di Sekolah Dasar. Namun, pelaksanaan pendidikan inklusif masih menghadapi berbagai tantangan, terutama terkait kesiapan dan kompetensi guru dalam mengelola kelas yang heterogen. Penelitian ini bertujuan mengeksplorasi peran guru dalam merancang pembelajaran inklusif melalui pendekatan diferensiasi di Sekolah Dasar. Metode yang digunakan adalah studi pustaka kualitatif deskriptif dengan menelaah berbagai sumber tertulis terkait teori dan praktik pendidikan inklusif dan diferensiasi. Hasil kajian menunjukkan bahwa pendekatan diferensiasi memungkinkan guru menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individual peserta didik, sehingga menciptakan lingkungan belajar yang inklusif, adil, dan bermakna. Keberhasilan

Article History

Received: Juni 2025

Reviewed: Juni 2025

Published: Juni 2025

Plagiarism Checker No 234

Prefix DOI: Prefix DOI:

10.8734/CAUSA.v1i2.365

Copyright: Author

Publish by: SINDORO



This work is licensed under a [Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License](https://creativecommons.org/licenses/by-nc/4.0/).

ISSN 3025-6488



9 773025 648007

implementasi sangat bergantung pada kompetensi pedagogis guru, kolaborasi dengan pemangku kepentingan, serta dukungan kebijakan dan institusional yang memadai. Meskipun terdapat kendala seperti keterbatasan pelatihan dan sumber daya, penguatan regulasi dan pelatihan berkelanjutan dapat meningkatkan efektivitas pendidikan inklusif berbasis diferensiasi. Dengan demikian, guru berperan sebagai agen perubahan dalam menciptakan pendidikan yang inklusif dan berkeadilan.

Kata kunci: Pendidikan Inklusif, Pendekatan Diferensiasi, Guru, Sekolah Dasar, Kompetensi Pedagogis

PENDAHULUAN

Pendidikan merupakan hak dasar setiap individu yang dijamin secara konstitusional dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Pasal 31. Amanat ini diperjelas melalui Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, yang menegaskan bahwa setiap warga negara memiliki hak yang sama untuk memperoleh pendidikan yang bermutu (Pasal 5 ayat 1). Secara eksplisit, negara juga berkewajiban menyediakan layanan pendidikan khusus bagi warga negara yang memiliki hambatan fisik, emosional, mental, intelektual, dan/atau sosial (Pasal 5 ayat 2), sebagai bentuk konkret dari prinsip keadilan sosial dan inklusivitas dalam sistem pendidikan nasional.

Pendidikan inklusif hadir sebagai sebuah pendekatan pendidikan yang menempatkan semua peserta didik, dengan segala keberagamannya, dalam satu sistem pendidikan yang terbuka, setara, dan nondiskriminatif. Konsep ini mendapatkan legitimasi secara global melalui Deklarasi Salamanca tahun 1994, yang menegaskan bahwa pendidikan untuk semua (Education for All) hanya dapat diwujudkan apabila sistem pendidikan bersifat inklusif dan dapat mengakomodasi berbagai perbedaan individu. Artinya, pendidikan inklusif tidak sekadar membuka akses bagi peserta didik berkebutuhan khusus, tetapi juga menuntut adanya perubahan paradigma, struktur, serta praktik pembelajaran yang mengedepankan penerimaan, keberagaman, dan partisipasi penuh semua pihak.

Namun demikian, dalam praktiknya, penyelenggaraan pendidikan inklusif di Indonesia masih menghadapi tantangan yang kompleks. Salah satu kendala utama adalah kesiapan dan kompetensi guru dalam mengelola kelas yang heterogen. Banyak guru yang belum mendapatkan pelatihan yang memadai terkait strategi pembelajaran inklusif, sehingga berdampak pada rendahnya kemampuan dalam mendesain dan mengimplementasikan pembelajaran yang mampu menjawab kebutuhan individual peserta didik. Keberadaan guru pendamping khusus (GPK) belum sepenuhnya mampu menjembatani kesenjangan ini, terutama dalam konteks Sekolah Dasar yang notabene menjadi tahap awal pengembangan potensi anak secara menyeluruh.

Dalam menjawab tantangan tersebut, pendekatan diferensiasi (differentiated instruction) menjadi salah satu strategi pedagogis yang relevan dan potensial. Pendekatan ini menekankan pada penyesuaian konten, proses, produk, dan lingkungan belajar berdasarkan kesiapan, minat, serta profil belajar peserta didik. Konsep ini berpijak pada keyakinan bahwa setiap anak belajar dengan cara yang berbeda dan memiliki kebutuhan unik yang tidak dapat dipenuhi dengan strategi pembelajaran yang seragam. Dengan demikian, pendekatan diferensiasi memungkinkan guru untuk menjadi lebih adaptif dan responsif terhadap keberagaman siswa, serta menciptakan suasana belajar yang lebih inklusif, bermakna, dan menantang.

Usia sekolah dasar menjadi fase krusial dalam penerapan pendekatan ini, mengingat pada tahap ini anak-anak mulai membentuk dasar-dasar kognitif, afektif, dan psikomotoriknya.

Guru Sekolah Dasar tidak hanya bertanggung jawab dalam mentransfer pengetahuan, tetapi juga memiliki peran penting dalam membentuk karakter dan sikap sosial anak, termasuk penerimaan terhadap perbedaan. Oleh karena itu, keberhasilan pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh sejauh mana guru dapat mendesain pengajaran yang tidak hanya akomodatif, tetapi juga transformatif dan berkeadilan.

Tulisan ini bertujuan untuk mengeksplorasi secara kritis dan komprehensif peran guru dalam merancang pengajaran inklusif melalui pendekatan diferensiasi di Sekolah Dasar. Kajian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi dalam penguatan praktik pedagogis yang berbasis pada keadilan, inklusi, dan keberagaman, sekaligus menjawab tantangan implementasi pendidikan inklusif di tingkat dasar secara lebih sistematis dan kontekstual.

TINJAUAN PUSTAKA

Konsep Pendidikan Inklusif

Pendidikan inklusif merupakan sistem pendidikan yang membuka peluang bagi semua peserta didik, termasuk anak berkebutuhan khusus, untuk belajar bersama dalam satu lingkungan pendidikan yang sama. Konsep ini berakar pada prinsip keadilan sosial dan hak asasi manusia yang menolak segala bentuk diskriminasi dalam pendidikan. UNESCO (1994) melalui Deklarasi Salamanca menegaskan bahwa sekolah reguler dengan orientasi inklusif adalah sarana paling efektif untuk memerangi sikap diskriminatif, membentuk masyarakat yang inklusif, serta mencapai pendidikan untuk semua (Education for All). Di Indonesia, landasan yuridis pendidikan inklusif tertuang dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional serta diperkuat melalui Permendiknas Nomor 70 Tahun 2009.

Peran Guru dalam Pendidikan Inklusif

Guru memiliki peranan vital dalam implementasi pendidikan inklusif. Guru tidak hanya bertindak sebagai penyampai informasi, tetapi juga sebagai fasilitator, mediator, dan penggerak inklusi di ruang kelas. Menurut Ainscow & Miles (2009), kualitas pendidikan inklusif sangat ditentukan oleh kemampuan guru dalam membangun praktik pedagogis yang responsif terhadap kebutuhan siswa. Guru yang efektif dalam pendidikan inklusif adalah mereka yang mampu mengelola keberagaman, menciptakan lingkungan belajar yang positif, serta menjalin kolaborasi dengan orang tua dan tenaga ahli lainnya seperti guru pendamping khusus (GPK).

Pendekatan Diferensiasi dalam Pembelajaran

Pendekatan diferensiasi (differentiated instruction) adalah strategi pembelajaran yang secara sadar menyesuaikan isi (content), proses (process), dan produk (product) pembelajaran sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa. Carol Ann Tomlinson (2001) menyebutkan bahwa diferensiasi merupakan pendekatan yang memberikan kesempatan kepada guru untuk mengajar secara proaktif, dengan memperhitungkan keunikan tiap individu siswa dalam satu kelas. Dalam konteks pendidikan inklusif, pendekatan ini sangat relevan karena memberikan fleksibilitas dalam menyusun rancangan pembelajaran yang tidak bersifat seragam (one size fits all), melainkan adaptif dan kontekstual.

Kesiapan dan Kompetensi Guru

Salah satu tantangan utama dalam pendidikan inklusif adalah kurangnya kesiapan guru dalam mengelola kelas yang heterogen. Studi yang dilakukan oleh Kristanti et al. (2023) menunjukkan bahwa banyak guru masih menghadapi kesulitan dalam menerapkan strategi pembelajaran yang sesuai dengan kebutuhan anak berkebutuhan khusus, terutama di sekolah reguler. Oleh karena itu, peningkatan kapasitas guru melalui pelatihan pedagogik, workshop diferensiasi, dan penguatan komunitas belajar guru menjadi krusial dalam memastikan keberhasilan pendidikan inklusif.

Kebijakan dan Dukungan Institusional

Kebijakan pendidikan inklusif tidak hanya cukup dicanangkan melalui regulasi, tetapi harus disertai dengan dukungan institusional yang kuat, baik dari pemerintah pusat, daerah, hingga pihak sekolah. Menurut Rahim (2020), keberhasilan pendidikan inklusif bergantung pada sinergi antara regulasi, ketersediaan sumber daya, penguatan manajemen sekolah, serta kemitraan yang inklusif dengan orang tua dan masyarakat. Sekolah harus bertransformasi menjadi komunitas belajar yang mendukung seluruh peserta didik tanpa pengecualian.

METODE

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan metode studi pustaka (library research). Pendekatan ini dipilih karena sesuai untuk mengeksplorasi secara mendalam konsep, teori, dan praktik yang berkaitan dengan peran guru dalam mendesain pembelajaran inklusif melalui pendekatan diferensiasi di Sekolah Dasar.

Menurut Nazir (2003), studi pustaka merupakan teknik pengumpulan data yang dilakukan melalui penelaahan terhadap berbagai sumber tertulis seperti buku, jurnal ilmiah, dokumen kebijakan, artikel, dan hasil-hasil penelitian terdahulu yang relevan dengan fokus kajian. Dengan demikian, metode ini memungkinkan peneliti untuk merangkum dan mengkaji secara komprehensif berbagai gagasan teoritik dan praktik yang berkembang di lapangan pendidikan inklusif.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Penerapan pendidikan inklusif di Sekolah Dasar menjadi tantangan sekaligus peluang bagi para guru dalam menciptakan lingkungan belajar yang ramah, adil, dan partisipatif bagi semua peserta didik. Hasil studi literatur menunjukkan bahwa pendekatan diferensiasi menjadi strategi pedagogis yang sangat potensial dalam mewujudkan tujuan pendidikan inklusif tersebut.

Guru sebagai aktor utama di ruang kelas memiliki tanggung jawab untuk mendesain pengalaman belajar yang tidak seragam namun adil bagi setiap siswa. Dalam konteks pembelajaran inklusif, guru perlu memahami bahwa setiap anak memiliki kebutuhan belajar yang unik. Tomlinson (2001) menekankan bahwa diferensiasi merupakan respon terhadap keragaman tersebut dengan memodifikasi konten, proses, dan produk pembelajaran agar sesuai dengan kesiapan, minat, dan gaya belajar siswa.

Dalam praktiknya, guru harus mampu melakukan pemetaan karakteristik siswa sebagai dasar penerapan diferensiasi. Guru juga dituntut untuk menyediakan pilihan pembelajaran yang bervariasi dan fleksibel, misalnya melalui penggunaan media visual, audio, taktil, atau digital, yang disesuaikan dengan kekuatan dan kebutuhan siswa. Proses evaluasi pun sebaiknya mengakomodasi hasil belajar yang beragam, tidak terbatas pada tes tertulis semata, melainkan juga presentasi, proyek, atau produk kreatif lainnya.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa dukungan lingkungan sekolah sangat memengaruhi efektivitas penerapan pembelajaran inklusif berbasis diferensiasi. Sekolah yang memiliki kebijakan manajemen inklusif yang baik, kolaborasi antara guru reguler dan guru pendamping khusus (GPK), serta hubungan kemitraan yang erat dengan orang tua, cenderung mampu menciptakan praktik pembelajaran yang inklusif dan bermakna. Hal ini sejalan dengan temuan Bahri (2022) yang menyebutkan bahwa manajemen pendidikan inklusif mencakup aspek kurikulum, peserta didik, pendidik, fasilitas, dan hubungan masyarakat.

Namun demikian, guru masih menghadapi berbagai kendala dalam implementasi pendekatan ini. Keterbatasan jumlah dan kompetensi guru pendamping, minimnya pelatihan profesional yang relevan, serta beban administratif yang tinggi menjadi penghambat utama. Kendala lain yang kerap muncul adalah kurangnya pemahaman guru mengenai prinsip-prinsip pedagogi inklusif dan resistensi terhadap perubahan dalam pola pembelajaran tradisional.

Solusi dari permasalahan ini perlu bersifat sistemik dan berkelanjutan. Pemerintah perlu memperkuat regulasi yang mendukung pendidikan inklusif melalui kebijakan afirmatif, penyediaan sumber daya yang cukup, serta pelatihan berkelanjutan bagi guru dalam merancang pembelajaran berbasis diferensiasi. Di sisi lain, lembaga pendidikan guru perlu menanamkan nilai-nilai inklusif dalam kurikulum mereka agar calon guru memiliki kompetensi yang memadai sejak awal.

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa pendekatan diferensiasi adalah strategi yang sangat relevan dan adaptif dalam menghadapi tantangan pembelajaran inklusif di Sekolah Dasar. Keberhasilan pendekatan ini sangat bergantung pada peran aktif guru sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran, didukung oleh sistem pendidikan yang inklusif dan kolaboratif.

KESIMPULAN

Pendidikan inklusif merupakan wujud nyata dari upaya mewujudkan keadilan dan kesetaraan dalam sistem pendidikan nasional. Dalam konteks Sekolah Dasar, keberhasilan implementasi pendidikan inklusif sangat bergantung pada peran guru sebagai perancang dan pelaksana pembelajaran yang adaptif terhadap keberagaman peserta didik. Pendekatan diferensiasi menjadi strategi yang efektif dalam menjawab tantangan ini, karena memungkinkan guru untuk menyesuaikan konten, proses, dan produk pembelajaran sesuai dengan kebutuhan individu siswa.

Hasil kajian menunjukkan bahwa guru perlu memiliki kompetensi pedagogis yang kuat, keterampilan dalam memetakan karakteristik siswa, serta kemampuan untuk mendesain pembelajaran yang fleksibel dan kontekstual. Selain itu, kolaborasi antara guru, sekolah, orang tua, dan pemangku kebijakan sangat diperlukan untuk menciptakan ekosistem pendidikan yang mendukung prinsip inklusivitas.

Meskipun masih terdapat berbagai tantangan, seperti keterbatasan pelatihan dan sumber daya pendukung, namun melalui penguatan kebijakan, pelatihan berkelanjutan, serta transformasi paradigma pendidikan, pendekatan diferensiasi dapat diimplementasikan secara optimal. Dengan demikian, guru tidak hanya menjadi fasilitator pembelajaran, tetapi juga agen perubahan dalam menciptakan pendidikan yang ramah, adil, dan menjangkau semua peserta didik tanpa kecuali.

DAFTAR PUSTAKA

- Ainscow, M., & Miles, S. (2009). *Developing inclusive education systems: How can we move policies forward?* *Prospects*, 39(3), 273-282.
- Bahri, S. (2022). Manajemen Pendidikan Inklusi di Sekolah Dasar. *Edukatif: Jurnal Ilmu Pendidikan*, 4(1), 94-100. <https://doi.org/10.31004/edukatif.v4i1.1754>
- Kristanti, D. A., Meka, M., Dhoka, F. A., Poang, F., & Lajo, M. Y. (2023). Pendidikan Inklusi Sebagai Upaya Mengatasi Permasalahan Sosial Anak Berkebutuhan Khusus. *Jurnal Pendidikan Inklusi Citra Bakti*, 1(1). <https://doi.org/10.38048/jpicb.v1i1.2101>
- Nazir, M. (2003). *Metode Penelitian*. Jakarta: Ghalia Indonesia.
- Rahim, A. (2020). Pendidikan Inklusif Sebagai Strategi dalam Mewujudkan Pendidikan untuk Semua. *Universitas Sarjanawiyata Tamansiswa*.
- Ramadhanti, I., & Herawati, N. I. (2024). Implementasi Pendidikan Inklusif di Sekolah Dasar. *Pendas: Jurnal Ilmiah Pendidikan Dasar*, 9(2), 6854-6859.
- Tomlinson, C. A. (2001). *How to Differentiate Instruction in Mixed-Ability Classrooms* (2nd ed.). Alexandria, VA: ASCD.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 1997 tentang Penyandang Cacat.

Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 70 Tahun 2009 tentang Pendidikan Inklusif bagi Peserta Didik yang Memiliki Kelainan dan Memiliki Potensi Kecerdasan dan/atau Bakat Istimewa.

UNESCO. (1994). *The Salamanca Statement and Framework for Action on Special Needs Education*. Salamanca: UNESCO.